

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2019

Jl. Pancasila No. 12 Gunungsitoli
Gunungsitoli - Sumatera Utara 22814
Telp. 0639 21343 Fax. 0639 21343
e-mail : info@pn-gunungsitoli.go.id



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2019

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pancasila No. 12 Gunungsitoli

Telp. 0639 21343 Fax. 0639 21343

Gunungsitoli - Sumatera Utara 22814

e-mail : info@pn-gunungsitoli.go.id

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Gunungsitoli, 02 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,



Elixander Saragih, SH
NIP.197265261992031001

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	13
II. Neraca	15
III. Laporan Operasional	18
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	21
V. Catatan atas Laporan Keuangan	23
A. Penjelasan Umum	23
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	34
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	38
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	46
F. Pengungkapan Penting Lainnya	56
Daftar dan Lampiran	58
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	59
Daftar Hibah Langsung	62

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Jl. Pancasila No. 12 Gunungsitoli Gunungsitoli - Sumatera Utara 22814

Telp. 0639 21343 Fax. 0639 21343 e-mail : info@pn-gunungsitoli.go.id

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2019 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gunungsitoli, 02 Januari 2020

Kuasa Pengguna Anggaran,



Elixsander Saragih, SH

NIP.197205261992031001

RINGKASAN

Ringkasan

Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Tahun 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2019 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 4.765.358 atau mencapai 0,00 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp 0.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2019 adalah sebesar Rp 3.571.405.349 atau mencapai 98,09 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 3.641.070.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2019 dan 2018 . Nilai Aset per 31 Desember 2019 dicatat dan disajikan sebesar Rp 52.479.972.628, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 1.685.200; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 52.476.431.178; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp 1.856.250.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 14.341.545 dan Rp 52.465.631.083.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp 10.265.130, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 4.941.349.104, sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan

Operasional senilai Rp(4,931.083.974). Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp 496.692 dan surplus(defisit) sebesar Rp 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp (4.930.587.282).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2019 adalah sebesar Rp 52.648.687.712 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. (4.930.587.282) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp 0, dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp 4.747.530.653, sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2019 adalah senilai Rp 52.465.631.083.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 , disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2019 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2019			TA 2018
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	3.000.000	10.265.130	342,17	4.765.358
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		3.000.000	10.265.130	342,17	4.765.358
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	3.176.898.000	3.155.605.399	99,33	2.723.216.049
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.358.493.000	1.281.188.194	94,31	809.621.300
3.	Belanja Modal	B.2.3.	150.500.000	150.100.000	99,73	38.568.000
	Jumlah Belanja Negara		4.685.891.000	4.586.893.593	97,89	3.571.405.349

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 2.	0	6.750.510
Persediaan	C. 3.	1.685.200	757.260
Jumlah Aset Lancar		1.685.200	757.260
Aset Tetap			
Tanah	C. 4.	42.744.912.000	42.744.912.000
Peralatan dan Mesin	C. 5.	2.240.982.593	1.932.480.403
Gedung dan Bangunan	C. 6.	9.945.888.000	9.945.888.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C. 7.	155.542.000	155.542.000
Aset Tetap Lainnya	C. 8.	3.190.440	3.190.440
Konstruksi dalam Pengerjaan	C. 9.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C. 10.	(2.614.083.855)	(2.138.288.048)
Jumlah Aset Tetap		52.476.431.178	52.643.724.795
Aset tak Berwujud	C. 11.	4.950.000	4.950.000
Aset Lain-Lain	C. 12.	12.500.000	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C. 13.	(15.593.750)	(1.856.250)
Jumlah Aset		52.579.972.628	52.654.326.315
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak ketiga	C. 14.	14.341.545	5.638.603
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		14.341.545	5.638.603

	Jumlah Kewajiban	14.341.545	5.638.603
EKUITAS			
Ekuitas	C. 15.		
	Jumlah Ekuitas Dana	52.465.631.083	52.648.687.712
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	52.479.972.628	52.648.687.712

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	10.265.130	4.765.358
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	3.160.555.909	2.704.242.539
Beban Persediaan	D. 3	40.253.500	55.701.340
Beban Barang dan Jasa	D. 4	802.346.474	382.530.975
Beban Pemeliharaan	D. 5	319.963.252	309.480.500
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	128.696.662	65.277.685
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	489.533.307	446.538.566
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Jumlah Beban		4.941.349.104	3.963.771.605
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(4.931.083.974)	(3.959.006.247)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	D. 11	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.717.300	6.015.400
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		1.220.608	733.300

Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	496.692	5.282.100
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	(4.930.587.282)	(3.953.724.147)
Pos Luar Biasa	D. 12	
Pendapatan PNB	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(4.930.587.282)	(3.953.724.147)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI GUNUNG SITOLI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2019 DAN 2018
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Ekuitas Awal	E. 1	52.648.687.712	53.035.771.868
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(4.930.587.282)	(3.953.724.147)
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas	E. 3	0	0
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar	E. 3.1	0	0
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3.2	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 3.3	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 3.4	0	42.925.824.519
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 3.5	0	1.671.379.000
Koreksi Lain-lain	E. 3.6	0	0
Jumlah		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 4	4.747.530.653	3.566.639.991
Ekuitas Akhir		52.465.631.083	52.648.687.712

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Visi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang Agung.

Misi Pengadilan Negeri Gunung Sitoli adalah

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan tranparansi badan peradilan.
5. Menciptakan aparatur Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme secara handal dan professional di bidang tugasnya masing-masing

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Gunung Sitoli melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Ketenagaan mencakup:
 - a) Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi
 - b) Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan.
 - c) Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang ada.
 - d) Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi
2. Sarana mencakup :
 - a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata
 - b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana, berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi.
 - c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan fisik Pengadilan Negeri Gunungsitoli.
3. Ketatalaksanaan mencakup :
 - a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara optimal.
 - b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada.
4. Hukum materil mencakup :
 - a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum.
 - b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap masyarakat umum khususnya para pencari keadilan.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2019 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2019 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan

periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

Selama periode berjalan, Kantor Pengadilan Negeri Gunung Sitoli telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan jenis belanja antara lain:

No.	Uraian	Pagu Awal	Pagu Setelah Revisi
1.	Belanja Pegawai	2.668.723.000	3.176.898.000
2.	Belanja Barang	881.393.000	1.358.493.000
3.	Belanja Modal	138.000.000	150.500.000
Total Belanja		3.688.116.000	4.685.891.000

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp. 5.499.772 atau 115,41 persen dibandingkan TA 2018. Hal ini disebabkan karena :

1. Meningkatnya penerimaan kembali Persekot/uang muka gaji.

Perbandingan realisasi PNBPA TA 2019 dan 2018 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBPA per 31 Desember TA 2019 dan 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	2018	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.514.620	4.410.068	1.456.836	49,33
2.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	6.750.510	355.290	(2.796.790)	88,72
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
Total Pendapatan		10.265.130	4.765.358	1.339.954	21,94

B.1. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp
4.586.893.593*
3

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Gunung Sitoli per 31 Desember TA 2019 adalah sebesar Rp. 4.586.893.593 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 97,89% dari anggaran senilai Rp. 4.685.891.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember TA 2019		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.176.898.000	3.155.605.399	99,33
Belanja Barang	1.358.493.000	1.261.188.194	94,31
Belanja Modal	150.500.000	150.100.000	99,73
Total Belanja Bruto	4.685.891.000	4.586.896.271	98,09
Pengembalian Belanja		(2.678)	0
Total Belanja Netto	4.685.891.000	4.586.893.593	98,09

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 1.015.488.244 atau sebesar 28,43 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2019 memperoleh tambahan anggaran belanja Modal sebesar Rp. 12.600.000 untuk pembelian 1 unit laptop.
2. Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tahun 2019 memperoleh tambahan anggaran Tambahan Langganan Internet (BA.BUN) sebesar Rp. 471.600.000.

Perbandingan realisasi belanja TA 2019 dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut:

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	3.155.605.399	2.791.959.000	363.646.399	13,02
Belanja Barang	1.281.188.194	810.111.000	471.077.194	58,14
Belanja Modal	150.100.000	39.000.000	111.100.000	284,87
Total Belanja	4.685.891.000	3.641.070.000		

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
3.155.605.399*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Gunung Sitoli per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 3.155.605.399 dan Rp. 2.723.216.049.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 13,02 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Pengadilan Negeri Gunungsitoli mendapatkan Tunjangan Kemahalan Hakim.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.234.520.800	1.051.395.200	183.125.600	17,41
Beban Pembulatan Gaji PNS	19.722	17.586	2.136	12,14
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	98.674.590	83.998.420	14.676.170	17,47
Beban Tunj. Anak PNS	32.746.898	27.192.658	5.554.240	20,42
Beban Tunj. Struktural PNS	36.400.000	36.940.000	500.000	1,35
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.206.470.000	1.051.510.000	154.960.000	14,73
Beban Tunj. PPh PNS	148.609.307	124.100.637	24.508.670	19,74
Beban Tunj. Beras PNS	70.826.760	64.381.380	6.445.380	10,01
Beban Uang Makan PNS	218.910.000	208.301.000	10.609.000	5,09
Beban Tunjangan Umum PNS	11.230.000	5.180.000	6.050.000	116,79
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	97.200.000	70.200.000	27.000.000	38,46

Total Belanja Brutto	3.155.608.077	2.723.216.881	432.391.196	15,87
Pengembalian Belanja	(2.678)	(832)	(1.846)	(221,87)
Total Belanja Netto	3.155.605.399	2.723.216.049	432.389.350	15,87

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp
1.281.188.194*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Gunung Sitoli per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 1.281.188.194 dan Rp. 809.621.300.

Realisasi Belanja Barang TA 2019 mengalami kenaikan sebesar 58,24 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Terdapat Tambahan Anggaran sewa internet.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	721.244.921	310.048.029	411.196.892	132,628
Belanja Barang Non Operasional	46.020.000	7.980.000	38.040.000	476,69
Belanja Jasa	70.598.611	66.259.586	4.339.025	6,54
Belanja Pemeliharaan	314.628.000	304.908.000	9.720.000	3,18
Belanja Perjalanan Dinas	128.696.662	65.277.685	63.418.977	97,15
Total Belanja Brutto	1.281.188.194	809.621.300	471.566.894	58,24
Pengembalian Belanja	0	0		
Total Belanja Netto	1.281.188.194	809.621.300	471.566.894	58,24

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja
Modal :Rp
150.100.000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Gunung Sitoli per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018 adalah sebesar Rp. 150.100.000 dan Rp. 38.568.000. Realisasi Belanja Modal TA 2019 mengalami kenaikan sebesar (289,18) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2018. Hal ini disebabkan antara lain: Pada Tahun 2019 Pengadilan Negeri Gunungsitoli memperoleh Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 150.100.000 .

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	150.100.000	38.568.000	111.532.000	289,18
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	150.100.000	38.568.000	111.532.000	289,18
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	150.100.000	38.568.000	111.532.000	289,18

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp (1.685.200)

Aset Lancar

C.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2019	31 Desember TA 2018
	Jumlah	0	0

C.2. Belanja Dibayar di Muka

Belanja
Dibayar di
Muka: Rp 0

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 6.750.510. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara

penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2019	31 Desember TA 2018
	Jumlah	0	6.750.510

C.3.Persediaan

*Persediaan:
Rp 1.685.200*

Persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp.1.685.200 dan Rp. 757.260. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2019 dan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan 31 Desember 2018

No.	Uraian	31 Desember 2019	31 Desember 2018
1	Barang Konsumsi	1.685.200	757.260
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
	Total	1.685.200	757.260

C.4.Tanah

Tanah: Rp
42.744.912.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 42.744.912.000 dan Rp. 42.744.912.000.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	42.744.912.000
Mutasi Tambah	
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 31 Desember 2019	42.744.912.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	42.744.912.000

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	Luas (m ²)	Lokasi	Nilai
1.	1.008	Pulau- Plau Batu Tello	251.250.000
2.	794	Jl. IR. Soekarno G.Sitoli	5.859.688.000
3.	726	JL. GOMO G. SITOLI	5.593.845.000
4.	1.140	JL. BARU HILINAA	723.056.000
5.	3.822	JL. PANCASILA NO. 12 G.SITOLI	29.291.061.000
6.	1.000	JL. DIPONEGORO T. DALAM	615.000.000
7.	1.250	LAHEWA	411.012.000
Jumlah			42.744.912.000

C.5.Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin : Rp

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-

2.240.982.593 masing adalah sebesar Rp. 2.240.982 dan 1.932.480.403.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	1.932.480.403
Mutasi Tambah	
Pembelian	150.100.000
Transfer Masuk	158.402.190
Mutasi Kurang	
Penjualan	0
Saldo per 31 Desember 2019	2.240.982.593
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	(1.774.992.402)
Nilai Buku 31 Desember 2019	465.990.191

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.6.Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
9.945.888.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 9.945.888.000 dan Rp. 9.945.888.000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	9.945.888.000
Mutasi Tambah	
Selisih Revaluasi	0
Mutasi Kurang	
...	...
Saldo per 31 Desember 2019	9.945.888.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	(781.789.203)
Nilai Buku 31 Desember 2019	9.164.098.797

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.7.Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2019 dan 2018

Jaringan : Rp masing-masing adalah sebesar Rp. 155.542.000 dan Rp. 155.542.000.
155.542.000

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	155.542.000
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Penjualan	0
Saldo per 31 Desember 2019	155.542.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	(57.302.250)
Nilai Buku 31 Desember 2019	98.239.750

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.8.Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp*
3.190.440

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 3.190.440 dan Rp. 3.190.440.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2018	3.190.440
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Penjualan	0
Saldo per 31 Desember 2019	3.190.440
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	0
Nilai Buku 31 Desember 2019	3.190.440

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

C.9.Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.10. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp [2.614.083.855] Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp (2.614.083.855) dan Rp(2.138.288.048).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2019 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.240.982.593	1.774.992.402	465.990.191
2	Gedung dan Bangunan	9.945.888.000	781.789.203	9.164.098.797
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	155.542.000	57.302.250	98.239.750
4	Aset Tetap Lainnya	3.190.400	0	3.190.400
	Jumlah	12.345.602.993	2.614.083.855	9.731.519.138

C.11. Aset tak berwujud

Aset tak Berwujud : Rp 4.950.000 Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 4.950.000 dan Rp. 4.950.000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun mutasi transaksi ATB per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	4.950.000
Mutasi Tambah	
Pembelian	0

Mutasi Kurang	
Penjualan	0
Saldo per 31 Desember 2019	4.950.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	(3.093.750)
Nilai Buku 31 Desember 2019	1.856.250

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

C.12. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp
12.500.000

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 12.500.000 dan Rp. 0. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun mutasi transaksi ATB per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2018	0
Mutasi Tambah	
Pembelian	0
Mutasi Kurang	
Penjualan	0
Saldo per 31 Desember 2019	12.500.000
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2019	(12.500.000)
Nilai Buku 31 Desember 2019	0

Aset lain-lain pada Pengadilan Negeri Gunung Sitoli berupa Komputer yang sudah tidak digunakan lagi untuk menunjang operasional kantor.

C.13. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp (15.593.750)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing Rp (15.593.750) dan Rp. (1.856.250) Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan

kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2019	TA 2018
1	Aset tak Berwujud	4.950.000	4.950.000
2	Aset Lain-lain	12.500.000	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	0	0
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(15.593.750)	(1.856.250)
	Nilai buku Aset Lainnya	1.856.250	3.093.750

C.14. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka
dari KPPN:
Rp 0*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.15. Kewajiban

*Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp.
14.341.545*

Utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 14.341.545 dan Rp 5.638.603. Utang kepada Pihak ketiga adalah kewajiban yang belum dibayarkan yang timbul akibat telah diterimanya hak atas barang. Rincian lebih lanjut tentang utang kepad pihak ketiga disajikan dalam Neraca.

C.16. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp
52.465.631.083*

Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 52.465.631.083 dan Rp 52.648.687.712. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2019 terdapat penurunan nilai Ekuitas sebesar Rp. (183.056.629) atau sebesar (0,34%) dari nilai per 31 Desember TA 2018. Jumlah nilai Ekuitas pada periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp. 52.465.631.083, sedangkan per 31 Desember TA 2018 tercatat sebesar Rp. 52.648.687.712.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNbp : Rp
10.265.130*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp 4.765.358 dan Rp 4.765.358. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Naik(turun)%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	3.514.620	4.410.068	(20,30)
2.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	6.750.510	355.290	1.800,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
Total Pendapatan		10.265.130	4.765.358	115,41

D.2. Beban Pegawai

*Beban
Pegawai : Rp
3.160.555.909*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 3.160.555.909 dan Rp 2.704.242.539. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Naik(turun)%
1.	Beban Gaji	1.241.034.285	1.045.47.850	18,70
2.	Beban Tunjangan-tunjangan	1.919.521.624	2.599.694.689	(26,16)
3.	Beban Honorarium dan Vakansi	0	0	...
4.	Beban Lembur	0	0	...
	Total	3.160.555.909	2.704.242.539	16,87

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan : Rp
40.253.500*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 40.253.500 dan Rp 55.701.340. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	2019	2018	Naik(turun)%
1.	Beban Persediaan Konsumsi	40.253.500	55.701.340	(27,73)
2.	Beban Persediaan Strategis untuk Berjaga-jaga	0	0	0
3.	Beban Persediaan Lainnya	0	0	0
	Total	40.253.500	55.701.340	(27,73)

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa : Rp
802.346.474*

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 802.346.474 dan Rp 382.530.975. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Jasa per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	645.707.126	239.457.777	169,65
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	16.016.001	10.019.000	59,85
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	43.200.000	43.200.000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	14.900.000	18.090.000	(17,63)
Beban Bahan	0	7.980.000	(100)
Beban Langganan Listrik	80.102.613	62.315.706	28,54
Beban Langganan Telepon	874.160	1.103.607	(20,79)
Beban Langganan Air	1.546.574	364.885	323,85
Total Beban Barang dan Jasa	802.346.474	382.530.975	109,75

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp
319.963.252*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 319.963.252 dan Rp. 309.480.500. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	149.820.000	137.100.000	9,27
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	46.000.000	46.000.000	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	118.808.000	121.808.000	(2,46)
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	0	(100)
Beban Persediaan Bahan untuk pemeliharaan	5.335.252	4.572.500	16,68
Total Beban Pemeliharaan	319.963.252	309.480.500	3,38

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas : Rp
128.696.662*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 128.696.662 dan Rp. 65.277.685. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	128.696.662	65.277.685	97,15
Total Beban Perjalanan Dinas	128.696.662	65.277.685	97,15

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp 0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp. 0 Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp 446.538.566

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 446.538.566 dan Rp. 312.115.062 Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	168.601.624	125.606.886	34,22
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	312.715.683	312.715.680	0

Beban Penyusutan Irigasi	1.996.500	1.996.500	36,25
Beban Penyusutan Jaringan	4.982.000	4.982.000	0
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	1.237.500	1.237.500	100,00
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	489.533.307	446.538.566	9,62

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp 0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	0	0	0
Beban Aset Ekstrakomptabel Gedung dan Bangunan	0	0	0

Beban Aset Ekstrakomptabel Aset	0	0	0
Tetap Lainnya			
Total Beban Lain-lain	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp 1.220.608

Jumlah Beban Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 1.220.608 dan Rp. 733.300. Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Surplus(Defisit) Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0
Surplus(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0
Surplus(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	496.692	5.282.100	(90,60)
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	496.692	5.282.100	(90,60)

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember TA 2019 dan TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2019	TA 2018	Naik(Turun)%
Pendapatan PNPB	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 52.648.648.712 dan Rp. 53.035.771.868.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. (4.930.587.282) dan Rp. (3.953.724.147) Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 .

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember TA 2019
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp. 4.747.530.653 dan Rp. 3.566.639.991.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda

baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember TA 2019**
(dalam satuan Rupiah)

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(10.265.130)
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.586.893.593
Transfer Masuk	170.902.190
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	52.465.631.083

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2019, DDEL sebesar (Rp 10.265.130) sedangkan DKEL sebesar Rp. 4.586.893.593.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan transaksi atas pencatatan transfer Masuk/Keluar KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa. Pada periode hingga 31 Desember 2019, Transfer Masuk sebesar Rp. 170.902.190, sedangkan Transfer Keluar Rp.0.

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2019 dan 2018 adalah masing-masing sebesar Rp 52.465.631.083 dan Rp 52.648.687.712.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Beban Listrik Bulan Desember 2019 yang seharusnya dibayarkan di bulan desember 2019, tetapi dibayarkan di bulan Januari 2019 sebesar Rp. 13.744.338.
2. Beban Langganan Telepon Bulan Desember 2019 yang seharusnya dibayarkan di bulan desember 2019, tetapi dibayarkan di bulan Januari 2019 sebesar Rp. 37.370.
3. Beban Langganan Telepon Bulan Desember 2019 yang seharusnya dibayarkan di bulan desember 2019, tetapi dibayarkan di bulan Januari 2019 sebesar Rp. 34,070.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Gunung Sitoli adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia A/C 0176.01.000093.30.3 a.n. BPG 007 Pengadilan Negeri Gunungsitoli 098696 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0.
2. Bank Rakyat Indonesia A/C 0176.01.000679.30.3 a.n. BPG 007 Pengadilan Negeri Gunungsitoli 099198 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp.0.
3. Bank Rakyat Indonesia A/C 0176.01.000420.30.6 a.n. RPL 007 PN GSITOLI UTK PDT BIAYA

PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 324.949.425.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi Pagu Gaji Minus disebabkan Pengadilan Negeri Gunungsitoli mendapat 3 Pegawai CPNS.
2. Perubahan POK dari akun belanja pemeliharaan mesin menjadi akun belanja barang persediaan barang konsumsi yang disebabkan karena banyaknya kebutuhan ATK.

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai Ralat SPM :

1. Terdapat ralat SPM Nomor : 00001 tanggal 02-01-2019, No. SP2D :180071503000055 tanggal 02-01-2019, yang disebabkan terdapat salah kode MAP di SPM, seharusnya tertulis MAP 425131, tetapi ditulis 4259992.
2. Terdapat ralat SPM Nomor : 00002 tanggal 15-01-2019, No. SP2D :180071503000067 tanggal 01-02-2019, yang disebabkan terdapat salah kode MAP di SPM, seharusnya tertulis MAP 425131, tetapi ditulis 425999

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya.

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap

untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2019	2019	Per 31 Desember 2019	Per 31 Desember 2019
A.	Peralatan dan Mesin		2.266.103.093	1.644.011.278	168.601.624	1.800.112.902	465.990.191
1.	Alat Bantu	7	25.000.000	25.000.000	0	25.000.000	0
2.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	434.264.000	434.264.000	0	434.264.000	0
3.	Alat Kantor	5	288.248.766	229.901.566	13.647.400	243.548.966	44.699.800
4.	Alat Rumah Tangga	5	781.688.237	543.160.437	70.162.600	613.323.037	168.365.200
5.	Alat Studio	5	47.351.000	23.817.000	4.841.600	28.658.600	18.692.400
6.	Alat Komunikasi	5	59.829.100	59.829.100	0	59.829.100	0
7.	Alat Kedokteran	5	20.000.000	12.000.000	4.000.000	16.000.000	4.000.000
8.	Unit Alat Laboratorium	8	9.525.000	9.525.000	0	9.525.000	0
9.	Komputer Unit	4	404.513.500	228.096.775	52.564.950	268.161.725	136.351.225
10.	Peralatan Komputer	4	195.683.490	78.417.400	23.385.074	101.802.474	93.881.016
B.	Gedung dan Bangunan		9.945.888.000	469.073.520	312.715.683	781.789.203	9.164.098.797
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	6.952.579.000	278.579.772	185.719.848	464.299.620	6.488.279.380

2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2.993.309.000	190.493.748	126.995.835	317.489.583	2.675.819.417
C.	Irigasi		55.902.000	2.994.750	1.996.500	4.991.250	50.910.750
1	Bangunan Air Bersih/air Baku	40	55.902.000	2.994.750	1.996.500	4.991.250	50.910.750
D.	Jaringan		99.640.000	42.329.000	4.982.000	52.311.000	47.329.000
1	Jaringan Telepon	20	99.640.000	47.329.000	4.982.000	52.311.000	47.329.000
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	7					
2.	Alat Kantor	5					
3.	Alat Rumah Tangga	5					
4.	Komputer Unit	4					
5.	Peralatan Komputer	4	12.500.000			12.500.000	0
6.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50					
	Jumlah		12.380.033.093	2.163.408.548	488.295.807	2.651.704.355	9.728.328.738

B. Daftar Hibah Langsung

Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2019

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
	NIHIL	U					
			Jumlah :				